

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Ade Irawan, et. al., 2012, *Korupsi Pemilukada, Indonesian Corruption Watch*, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta

Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.

Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994).

Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001).

Hestu Cipto Handoyo. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Alam Pustaka. Yogyakarta.

KPU RI. 2015. *Buku Saku Dana Kampanye. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Jakarta.

Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015).

Veri Junaidi, Dkk .2011. *Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan Dan Praktek Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. Jakarta .

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. Sumber Lain

Bruno Wilhem Speck, 2013. *Money in Politics Sound : Political Competition And Trust in Governomt OECD Baground Paper*.

Dedi Irawan, “*Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015),

Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2013, *Basa-Basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta

Didik Supriyanto, Lia Wulandari, Armanda Pransiska, dan Catherine Natalia (Editor), 2015, *Dana Kampanye Pilkada: Pengaturan Teknis tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan Undang-Undang No 1/2015 Juncto UU No 8/2015*, Yayasan Perludem, Jakarta

Didik Suriyanto .2012.*Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik : Review Terhadap PP Nomor 5/2009 Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Daerah Baru Didasarkan UU No 2/2011, Dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna . Jurnal Perludem Volume 3 (2)*

Felix Natnaniel, “*Bisnis Tambang Merebak Seiring Pilkada Serentak*”, <https://tirto.id/bisnis-tambang-merebak-seiring-pilkada-serentakcG4x>, Marcin Welecky, 2007. *Spending Limits As Apolicy Option, IFES Political Finance White Paper Series*,

<https://padang.tribunnews.com/2023/02/10/diduga-korupsi-saat-menjabat-di-bawaslu-sumsel-ketua-dpc-demokrat-solok-ditahan-kejari-prabumulih> diakses pada 3 Mei 2023 pukul 22.00 WIB

<https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/8KyXY4zk-kpu-keluhkan-dana-kampanye-pemilu-2019-tidak-transparan>

Khairul Fahmi, *Pembatasan Dana Kampanye Pilkada*, Media Indonesia

Salabi, A. (2010). *Dana Kampanye di Politik Elektoral 2019, Menanti Keberanian Penyelenggara Pemilu dari* :<http://perludem.org/2018/04/13/dana-kampanye-di-politik-elektoral-2019-menanti-keberanian-penyelenggara-pemilu-oleh-amalia-salabi/>

Sukmajati, M & Disyacitta, F. 2019. *Pendanaan Pemilu Serentak 2019 di Indonesia : Penguatan Demokrasi Patronase ?*. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5(1).

Team Kompas, “*Biaya Pilkada Picu Korupsi*”, <http://www.ti.or.id/index.php/news/2016/09/28/biaya-pilkada-picu-korupsi>

Tri Hayati, 2011, “*Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah: Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka*”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yusfitriadi, 2018, “*Audit Dana Kampanye Pilkada Serentak 2015 di Indonesia: Studi Kasus di 11 Kabupaten/Kota*”, dalam Mada Sukmajati dan Aditya Perdana (eds), *Pembiayaan Pemilu Di Indonesia*, Bawaslu, Jakarta.